

IMPLEMENTASI PROGRAM *PESAT* BAGI SISWA SMP OLEH DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF A *PESAT* PROGRAM FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS BY THE YOGYAKARTA CITY EDUCATION OFFICE

Oleh : Nisa Sumayyah Aulia, Universitas Negeri Yogyakarta
nisasumayyah.2020@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program *Personal Ability Test (PESAT)* yaitu program yang bertujuan untuk melakukan asesmen diagnostik masing-masing peserta didik terkait dengan kemampuan, potensi akademik, dan kondisi potensi psikologis peserta didik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh model George C. Edward III. 4 (empat) variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah berjalan maksimal. Hal tersebut dilihat dari aspek komunikasi yaitu informasi tersampaikan dengan baik. Sumber daya manusia dan non manusia yang telah terpenuhi. Disposisi setiap pelaksana *PESAT* baik. Selain itu, pada aspek struktur birokrasi setiap lembaga yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan, Halobakat, dan sekolah memiliki tim tersendiri dalam pelaksanaan *PESAT*.

Kata Kunci : Implementasi, Program *PESAT*, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Abstract

This research aims to determine the implementation of the Personal Ability Test (PESAT) program, which is a program that aims to carry out a diagnostic assessment of each student regarding their abilities, academic potential and the condition of the student's psychological potential. The type of research used in this research is case study research with a qualitative approach. Data analysis in this research was through interviews, observation and documentation. The focus of this research is based on the policy implementation model proposed by George C. Edward III. 4 (four) variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the research show that the implementation of the PESAT program for junior high school students by the Yogyakarta City Education Office has been running optimally. This can be seen from the communication aspect, namely that the information is conveyed well. Human and non-human resources that have been fulfilled. The disposition of every PESAT implementer is good. Apart from that, in terms of bureaucratic structure, each institution involved, namely the Education Office, Halobakat, and schools, has its own team in implementing PESAT.

Keywords: Implementation, PESAT Program, Yogyakarta City Education Office

PENDAHULUAN

Pendidikan berasal dari kata dasar didik dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata didik didefinisikan sebagai proses “memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai : usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20, 21, 22, dan 23 Tahun 2016 tentang “Standar Kompetensi Lulusan, isi, proses, dan penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah”, yang nantinya akan bermuara kepada Tujuan Pendidikan Nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa Kemendikbud melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah mengeluarkan standar-standar yang harus dipenuhi oleh

siswa, sekolah, dan penyelenggara pendidikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dapat mengetahui dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Potensi peserta didik yang berhasil dikembangkan, nantinya akan menghasilkan prestasi bagi peserta didik tersebut. Prestasi belajar yang diperoleh peserta didik dipengaruhi metode pembelajaran yang digunakan. Setiap guru memiliki metode belajar masing-masing untuk diterapkan ketika pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran di sekolah beracuan pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa dalam kegiatan inti pembelajaran merupakan proses untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD).

Kenyataannya masih terdapat beberapa masalah terkait strategi pembelajaran. Peneliti yang telah terjun ke lapangan menemukan fakta bahwa di beberapa sekolah, penerapan metode pembelajaran sering sekali berubah sehingga menimbulkan kebingungan bagi peserta didik. Peneliti juga menemukan bahwa guru saat ini masih kebingungan menerapkan metode pembelajaran karena mereka juga masih belajar dalam menggunakan media pembelajaran untuk menunjang hasil pembelajaran.

Penelitian Noli Handayani, dkk (2023) menunjukkan permasalahan dalam strategi pembelajaran di SMP Negeri 2 Sandai Kabupaten Ketapang adalah guru yang diangkat mengajar dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya menemui berbagai permasalahan dalam prosesnya seperti kesulitan dalam memahami materi dan siswa yang juga kesulitan dalam menyerap penjelasan dari guru, meskipun pihak sekolah memberikan strategi sebagai alternatif untuk memperlancar tugas guru namun tetap saja sebagai sebuah kebutuhan, seorang guru memang dituntut untuk menyelaraskan antara bidang keahliannya dengan tugas mengajarnya.

Permasalahan strategi belajar tersebut harus segera diselesaikan. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mencanangkan salah satu program yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah

tersebut. Program *PESAT (Personal Ability Test)* adalah program yang dilakukan untuk melakukan asesmen diagnostik masing-masing peserta didik terkait dengan kemampuan, potensi akademik, dan kondisi potensi psikologis siswa. Program ini nantinya akan dapat memberikan informasi yang efektif bagi guru maupun orang tua peserta didik, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kondisi dari setiap peserta didik.

Berpacu pada SK Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terkait dengan program *PESAT* yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta akan menggandeng pihak Halobakat sebagai mitra. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memilih Halobakat sebagai mitra karena Halobakat merupakan layanan yang memiliki fokus tujuan untuk mengembangkan minat atau potensi. Selain itu, Halobakat juga dapat mengeluarkan produk dalam hal ini adalah *assesmen* untuk penunjang pelaksanaan *PESAT*. Program ini hanya dimiliki dan baru dilakukan oleh lembaga pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Untuk itu, dirasa penting bagi peneliti mengetahui implementasi program *PESAT* serta faktor penghambat dan pendukungnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, Halobakat, dan tiga SMP di Kota Yogyakarta. Peneliti memilih lokasi tersebut karena merupakan tempat dilaksanakannya koordinasi terkait implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dari bulan Maret hingga April 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program *PESAT* bagi Siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Pada subpoint ini peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang terdapat pada subpoint sebelumnya, dengan menyesuaikan teori- teori literatur model implementasi George C.Edward III. Adapun terkait hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi. Komunikasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kepada mitra Halobakat dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta dalam pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014 : 12-14) untuk menganalisis data hasil penelitian. Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 12-13) yaitu kondensasi data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (verifikasi). implementasi program *PESAT*.

Komunikasi tersebut harus dilakukan secara benar dan tepat dengan harapan agar program *PESAT* dapat terlaksana dengan baik. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kepada mitra Halobakat dan sekolah dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan maupun program. Ketika komunikasi dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi pada implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kepada mitra Halobakat dan juga seluruh Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta.

Transmisi tersebut berupa penyampaian informasi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kepada mitra kerja sama yaitu Halobakat. Selain itu, transmisi juga berupa penyampaian informasi terkait pelaksanaan program *PESAT* kepada seluruh Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta.

b. Kejelasan

Menurut Edward III, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street level bureaucrats*) harus jelas dan tidak ambigu atau membingungkan berbagai pihak. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program *PESAT* dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kepada seluruh SMP di Kota Yogyakarta dengan narasumber dari mitra Halobakat. Penyampaian informasi ini dinilai sudah benar dengan mengadakan rapat mulai dari persiapan hingga penyampaian hasil program.

Kejelasan komunikasi implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti *workshop*, BIMTEK, maupun penyampaian hasil *PESAT* dinilai sudah

sangat jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pihak sekolah. Selain itu, juga terdapat bukti notulensi yang dikirimkan melalui grup WA agar informasi yang telah disampaikan bisa dibaca kembali oleh Waka Kurikulum. Selain itu, juga ada bukti dokumentasi berupa notulensi dari pelaksanaan *workshop PESAT*.

c. Konsisten

Menurut Edward III, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang konsisten perlu diperhatikan dalam sebuah komunikasi.

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kepada Halobakat maupun sekolah sudah konsisten dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pemaparan hasil *PESAT*.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan maupun suatu program dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan *skill* (kemampuan) yang dimiliki oleh pelaksana implementasi

program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. George C. Edward III berpendapat bahwa sumber daya terbagi menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (*staff*) dan non manusia (sarana prasarana dan pembiayaan).

a. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan maupun program tidak akan berhasil tanpa adanya sumberdaya manusia yang memiliki cukup kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, karena tanpa sumber daya manusia yang berkualitas implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai bidangnya dalam melaksanakan program tersebut.

Implementasi program *PESAT* sudah tercukupi sumber dayanya baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyampaikan bahwa setiap sekolah memiliki sumber daya yang memenuhi

terkait dengan pelaksanaan program *PESAT*. Waka Kurikulum juga menyampaikan bahwa guru yang ditugaskan dalam pelaksanaan program *PESAT* melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya program *PESAT*. Seluruh staff Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP dan Halobakat sudah memiliki kesiapan yang matang mulai dari kompetensi, kualifikasi, maupun pemahaman akan program *PESAT* dan bidangnya. Hal tersebut agar nantinya program *PESAT* dapat terlaksana dengan lancar.

b. Sumber Daya Non-Manusia (Sarana Prasarana dan Pembiayaan)

Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasana. Sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan maupun program. Implementor mungkin memiliki *staff* yang cukup, mengerti apa yang harus dilakukan, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana, maka implementasi kebijakan maupun program tidak akan berhasil. Untuk itu, fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan maupun program.

Sarana dan prasarana dalam implementasi program *PESAT* masih belum cukup memadai. Hal tersebut karena dari pihak Dinas Pendidikan tidak memiliki sarana prasarana yang cukup sehingga harus dipenuhi dari pihak Halobakat. Selain itu, sarana prasarana pihak sekolah belum terpikirkan dengan matang oleh Dinas Pendidikan. Hal itu menyebabkan ada sekolah yang sudah menggunakan komputer, tetapi juga ada sekolah yang menggunakan *handphone* dari masing-masing peserta didik. Kedepannya hal tersebut dapat menjadi perhatian lebih dari pihak Dinas Pendidikan.

Jika dari segi pembiayaan sudah dari pihak Dinas Pendidikan karena sudah memiliki rencana anggaran dalam setiap kegiatan yang tentunya sudah disetujui. Hal tersebut berdampak positif bagi Halobakat dan sekolah karena tidak perlu mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan *PESAT*.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam

praktiknya tidak terjadi bias.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ditanggapi cukup baik. Kemudian, pelaksanaan program *PESAT* di sekolah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas Pendidikan dan Halobakat sehingga pelaksanaan program *PESAT* di seluruh SMP dapat berjalan dengan lancar.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi suatu program. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu

sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan atau program biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program. SOP dibuat agar nantinya ketika pelaksanaan suatu program tidak melenceng dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi harus ada dalam implementasi sebuah program. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan program dapat terstruktur.

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah ada. Ketersediaan ini dimaksud dalam Bidang Pembinaan SMP, Halobakat, maupun dimasing-masing sekolah. Adanya kejelasan tugas dan beban kerja setiap lembaga, maka akan membuat implementasi *PESAT* optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program *PESAT* bagi Siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui kompetensi, psikologi, gaya belajar, maupun bakat peserta didik agar nantinya mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Dalam mencapai

kesuksesan pelaksanaan pelayanan tersebut tentu memiliki faktor pendukung dan penghambat yang menunjang pelaksanaan program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

1. Komunikasi

Faktor pendukung dalam komunikasi pelaksanaan program mempermudah setiap lembaga dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standart Operating Procedure* (SOP). Hal ini juga dibuktikan dengan adanya temuan peneliti mengenai struktur birokrasi pelaksanaan program *PESAT* baik dari Dinas Pendidikan, tim Halobakat, dan perwakilan sekolah.

Implementasi *PESAT* ini, seperti yang dikatakan oleh *staff* Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta maupun Waka Kurikulum sekolah yaitu dengan mengadakan workshop bagi Waka Kurikulum sekolah untuk menginformasikan pelaksanaan program *PESAT* tersebut. Selain itu, penggunaan WA grup dalam berkomunikasi terkait informasi yang kurang jelas juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Adapun yang menjadi faktor

penghambat yaitu masih terdapat beberapa informasi yang belum disampaikan atau kurang jelas dalam workshop yang dilakukan.

2. Sumber Daya

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor pendukung dalam sumber daya adalah setiap pegawai atau *staff* yang tergabung ke dalam tim sudah memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya seperti tim proktor, pengelolaan hasil *assesmen*, penanggung jawab sistem, penanggung jawab penyajian *report*, dan lainnya sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat maksimal. Dalam indikator sumber daya selain faktor pendukung juga ada faktor penghambat yaitu sarana prasarana dalam implementasi program *PESAT*. Sarana dan prasarana dalam implemementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta masih kurang efektif karena beberapa alat masih menggunakan alat dari Halobakat.

3. Disposisi

Keefektifan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh sikap baik dari para pelaksananya sehingga dapat melaksanakan program *PESAT* dengan maksimal. Kekurangan disposisi yaitu adanya kebingungan pihak sekolah dalam menggunakan aplikasi sehingga perlu dilaksanakan BIMTEK agar semua dapat memahami sistem aplikasi *PESAT*.

4. Struktur Birokrasi

Faktor pendukung dalam struktur birokrasi yaitu sudah terdapat struktur tim pelaksanaan *PESAT* baik dari Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Halobakat, maupun setiap sekolah. Hal tersebut membuat pelaksanaan *PESAT* lebih terstruktur. Faktor penghambat dalam struktur birokrasi tersebut adalah perizinan dan revisi terkait *assesmen* dengan pihak birokrasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sehingga membuat pelaksanaan *PESAT* sedikit lebih terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *PESAT* di tahun berikutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti mengenai Implementasi Program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dalam implementasi program *PESAT* dilihat dari indikator transmisi, kejelasan, dan konsisten, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah baik sehingga implementasi program *PESAT* dapat terlaksana dengan lancar.

2. Sumber Daya

Adapun indikator-indikator dalam sumber daya, yaitu :

- a) Pada indikator sumber daya manusia, pelaksanaan program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah tercukupi baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
 - b) Pada indikator sumber daya non manusia (sarana dan prasarana), dalam implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah terpenuhi cukup baik. Akan tetapi, masih ada beberapa sarana dan prasarana dari Dinas Pendidikan yang belum ada sehingga dari pihak Halobakat membantu pemenuhan sarana prasarana.
3. Disposisi

Dalam implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan sikap baik. Pelaksana program dalam hal ini selalu siap dan bertanggung jawab penuh terhadap implementasi program *PESAT*.

4. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki struktur birokrasi yang sudah baik mulai dari Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Halobakat, dan sekolah. Setiap lembaga telah memiliki struktur

masing-masing.

untuk memaksimalkan pelaksanaan program *PESAT*.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi program *PESAT* bagi siswa SMP oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, antara lain :

1. Dinas Pendidikan perlu mempertahankan komunikasi yang sudah dilakukan agar dapat diimplementasikan lebih baik lagi di tahun depan.
2. Dinas Pendidikan harus melaksanakan program *PESAT* di awal tahun ajaran baru agar nantinya hasil dari *PESAT* dapat digunakan untuk pembuatan rencana pembelajaran oleh sekolah dan guru.
3. Dinas Pendidikan harus melakukan koordinasi pembuatan assesmen lebih awal, sehingga kedepannya memiliki waktu yang cukup jika terdapat revisi. Hal tersebut perlu dilakukan agar nantinya program *PESAT* dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Sekolah perlu mempertahankan sumber daya manusia serta meningkatkan sumber daya non manusia agar dapat menyelesaikan masalah terkait sistem atau aplikasi

yang digunakan dalam implementasi *PESAT*.

Rekomendasi Kebijakan

Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta perlu membuat wadah dalam rangka memfasilitasi mitra dan sekolah untuk memberikan kritik dan saran dalam implementasi *PESAT*, agar kedepannya *PESAT* dapat terlaksana lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Dunn, N. William, (1999). Analisis Kebijakan (terjemahan), Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Edward III. George C. (1980). Implementing Public Policy. Washinton : Congressional Quarterly Inc.
- Nugroho, D Riant. (2008). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nasrun Harahap dkk, (2002). Teknik Penilaian Hasil Belajar. Jakarta, Bulan Bintang.
- Purwanto, Ngalim. (2006). Psikologi Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rohman, A. (2009). Masalah pembelajaran dan upaya pencarian solusi melalui klinik. Majalah Ilmiah Pembelajaran, 5(1).
- Sanjaya, Wina. (2014). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana. h. 147.
- Sanjaya, W. (2014). Pendekatan, Model Dan Strategi, dalam Model Pembelajaran. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 3(April), 49–58.
- Setyawati, A. (2012). Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Di Kabupaten Purworejo (Studi Tentang Implementasi Paud Non Formal).
- Sudjana. (2000). Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: Falah Production.
- Sudjana. (2004). Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Non Formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Falah Production.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tayibnafis, Yusuf. Faridah. (2000). Evaluasi Program. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tjilen, A. P. (2019). Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik . Bandung : Penerbit Nusa Media .
- Wahab, Solichin. (2010). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.